



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



BPKAD

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas Prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan Kinerja tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk informasi dan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025, guna menginformasikan atas capaian kinerja pada pengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

Akhirnya Laporan ini dapat menjadi sarana dan evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih baik, efektif dan efisien, dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tenggarong, 14 Februari 2026..

Kepala;


SUKOTJO, S. E.
Pembina Muda (IV/ c)
NIP. 197309081993021001.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2. Struktur Organisasi	5
1.3. Saran dan Prasarana	10
1.4. Keuangan	19
1.5. Permasalahan Utama dan Isu Strategis	19
1.6. Strategi dan Kebijakan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Rencana Kerja Tahunan	24
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Realisasi Anggaran	36
3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	37
BAB IV PENUTUP	38



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Kepala Daerah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2021 - 2026. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah:

1. Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 tahun 2023, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dijelaskan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah adalah sebagai berikut :

1.2.1 Kedudukan

BPKAD merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dibidang BPKAD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok

BPKAD melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

1.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;



- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

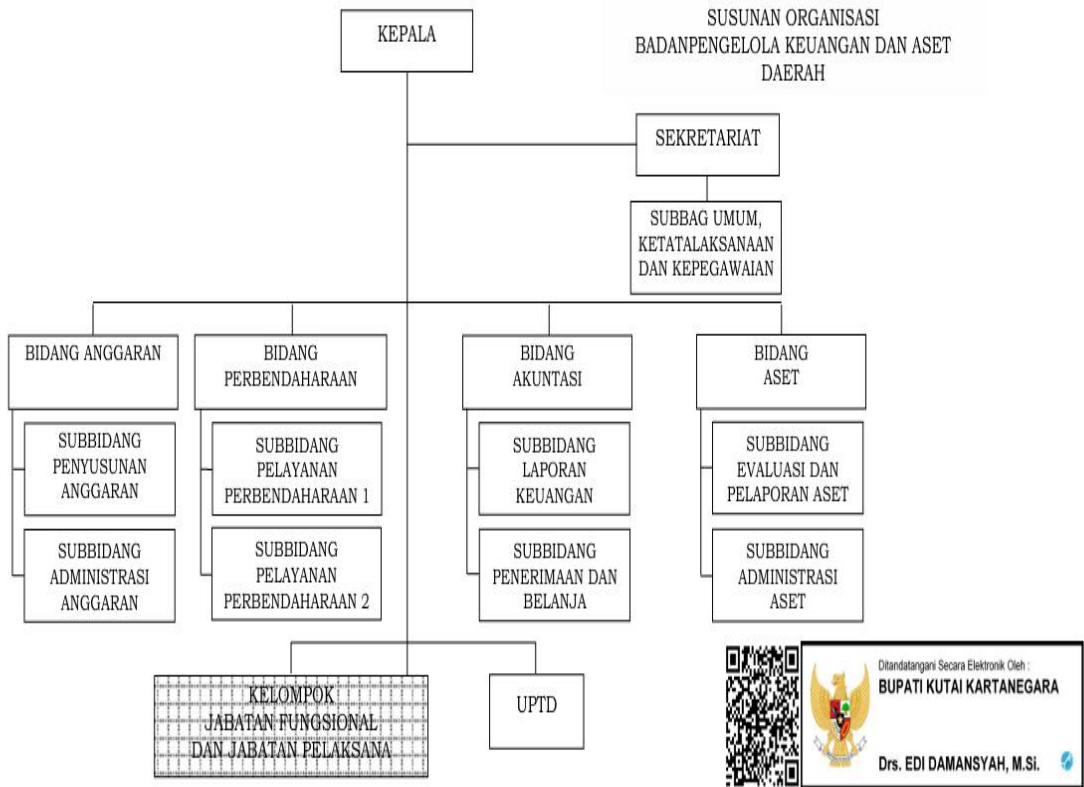
1.2.4 Susunan Organisasi

- 1. Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja Langsung;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja; dan
 - 2. Sub Bidang Laporan Keuangan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi ASet;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).



2. Bagan Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD Type A.
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2023 TANGGAL 11 OKTOBER 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH





Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BPKAD.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebanyak 155 orang. Penjelasan mengenai pegawai BPKAD disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.3.1
Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Eselon	Pegawai		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	I	0	0	0	
2	II	43	17	60	
3	III	36	33	69	
4	IV	10	4	14	
5	PPPK	9	3	12	
JUMLAH ESSELON		13	2	15	
JABATAN FUNGSIONAL		2	1	3	
NON ESSELON		83	54	125	
TOTAL JUMLAH		98	57	155	

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Desember 2025

Tabel 1.3.2
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

PEGAWAI					
No	Pendidikan	ASN	PPPK	Jumlah	Keterangan
1	S.3	0	0	0	
2	S.2	11	0	11	
3	S.1	66	0	66	
4	D.IV	0	0	0	



PEGAWAI					
No	Pendidikan	ASN	PPPK	Jumlah	Keterangan
5	SM	0	0	0	
6	D.III	6	0	6	
7	D.II	0	0	0	
8	D.I	0	0	0	
9	SLTA	59	5	64	
10	SLTP	1	6	7	
11	SD	0	1	1	
	JUMLAH	143	12	155	

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Desember 2025 .

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN BPKAD yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 66 dan 64 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 11 orang. ASN berdasarkan pangkat/ golongan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 1.3.3
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2025

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Keterangan
			Pria	Wanita		
I	Juru Muda	I/a	0	0	0	
	Juru Muda Tk.I	I/b	0	0	0	
	Juru	I/b	0	0	0	
	Juru Tk.I	I/b	0	0	0	
	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	
II	Pengatur Muda Tk.I	II/b	5	0	5	
	Pengatur	II/c	6	1	7	
	Pengatur Tk.I	II/d	32	16	48	
III	Penata Muda	III/a	19	6	25	
	Penata Muda Tk.I	III/b	2	2	4	
	Penata	III/c	5	6	11	
	Penata Tk.I	III/d	10	19	29	
IV	Pembina	IV/a	8	4	12	
	Pembina Tk.I	IV/b	1	0	1	
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1	



No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah	Keterangan
			Pria	Wanita		
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	
	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	
V	Golongan IX		3	2		
VI	Golongan V		5	1		
VII	Golongan I		1	0		
	JUMLAH		98	57	155	

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Desember 2025

1.3 Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawabnya.

Secara ringkas sebaran Sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4.1
Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumersible Pump	EBARA PUMP / AUTOMATIC SEMI VORTEX SEWAGE 50 DVSA 51.5/50	4
2	Pompa Air	Grundfos / JPD 5-61 PT-V	1
3	Station Wagon	TOYOTA / ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G M/T / MAG10GA/T00	1
4	Station Wagon	Mitsubishi / Xpander 1.5 L Ultimate-L 4X2 A/T	5
5	Station Wagon	Toyota / All New Kijang Innova Zenix HEV	1
6	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	TOYOTA HAICE / commuter M/T (KDH223R-LEMDY)	2
7	Pick Up	TOYOTA / HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T / GUN25DCGM	1
8	Pick Up	TOYOTA / HILUX 2.4G DOUBLE CABIN 4X4 M/T (GUN125R-DTFSXD)	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Scooter	Honda / MF0-STYLO 160 CBS	13
10	Lemari Besi/Metal	INF / B9-1 / B9-2	1
11	Rak Besi	Starlead / SR-4 Rak Susun	1
12	Filing Cabinet Besi	brother / B-104	2
13	Papan Visual/Papan Nama	PLANG ASET TANAH / Plang Besi Tancap Tanah 120 cm X 70 cm (plang) / 3	2
14	Papan Visual/Papan Nama	PLANG NAMA / PAPAN NAMA ASET TANAH / Besi Tancap Tanah/120x70cm(plang)/3x1,5 m(rangka)	2
15	Papan Visual/Papan Nama	Papan Nama Aset Tanah / Besi Tancap Tanah/120x70cm(plang)/3x1,5 m(rangka)	2
16	Papan Visual/Papan Nama	PAPAN NAMA RUMAH DINAS / Tempel Dinding / Uk.L40xP55cm	2
17	Alat Penghancur Kertas	Kozure / PS-4226C	2
18	Meja Kerja Besi/Metal	informa / rectangle	2
19	Meja Sekolah	Activ / Meja belajar Mahasiswa	1
20	Meja 1/2 Biro	Olympic / Particle Board Finishings PaperLaminate,Kaki Metal	1
21	Meja 1/2 Biro	Olympic / Particle Board Finishings,Kaki Metal	1
22	Meja 1/2 Biro	Calista / Meja Belajar	1
23	Meja 1/2 Biro	Olympic / Meja Belajar	1
24	Kasur/Spring Bed	Comforta / Superfit	2
25	Kasur/Spring Bed	OLYMPIC / Kasur Busa	1
26	Kasur/Spring Bed	Florence / Piacenza + dipan + bantal & guling	2



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kasur/Spring Bed	American / Supreme Oscar Hitam	1
28	Kasur/Spring Bed	Bearland by Olympic Springbed / Matras Empuk Single Size	1
29	Kasur/Spring Bed	Comforta / SUPER CHOICE	1
30	Kasur/Spring Bed	Comforta / COMFORT DUO FULLSET	1
31	Sofa	Sofa / Set L	1
32	Sofa	Tanpa Merk / seat 321 + meja	1
33	Sofa	Vanessa / Type L	1
34	Sofa	informa / 3 seat 2 seat 1 seat	2
35	Meubeler lainnya	EVO / Lemari Pakaian Bahan Kaca	1
36	Meubeler lainnya	EVO / Slide	1
37	Meubeler lainnya	Olymsteel / Lemari Pakaian Sliding FULL	1
38	Mesin Cuci	Sharp / ES-T85CR-PK	1
39	Lemari Es	Sharp / SJ-316MN-HS	1
40	Lemari Es	sharp / Side-by-side / SJ-IS60MA-DS	1
41	Lemari Es	Electrolux / ESE6600A-BID	1
42	A.C. Split	SHARP / AH-A18ZCY	8
43	A.C. Split	SHARP / AH-A9BEY	4



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
44	A.C. Split	Panasonic / Split CS-YN18WKJ	2
45	A.C. Split	Panasonic / CS-YN18WKJ	2
46	A.C. Split	Panasonic / CS-J45FFP8A	2
47	A.C. Split	Daikin / FTC35NV14	1
48	A.C. Split	Daikin / FTC25NV14	6
49	A.C. Split	Daikin / R32 / FTC50XV14	1
50	Televisi	LG / 55UQ7500PSF	2
51	Televisi	Samsung / QA55Q60DA	1
52	Televisi	Samsung / UA55DU7000K	1
53	Televisi	Samsung / UA32T4503	2
54	Televisi	Sony / BRAVIA KD-55X7K	2
55	Televisi	Samsung / UA55DU8000	3
56	Loudspeaker	JBL / MK10	2
57	Sound System	JBL / MK10	1
58	Sound System	JBL / PAKET CEILING SPEAKER PLAFON - 8128	1
59	Sound System	JBL / EON ONE MK2	1
60	Sound System	FdB / PAKET SPEAKER OUTDOOR LT- 212T	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
61	Sound System	JBL / PAKET SOUND SYSTEM Array Column Loudspeaker	1
62	Sound System	JBL / PAKET SOUND SYSTEM CBT	1
63	Sound System	JBL / PAKET SOUNDSYSTEM CBT	1
64	Dispenser	Sharp / SWD-72EHL-BK	2
65	Mimbar/Podium	Krisbow / Minimalis	1
66	Gordyin/Kray	Tanpa Merk / Gordin Panjang dan Pendek	1
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Chairman / RAFFLES PC - 9610 A	1
68	Buffet Kaca	Lemari Kaca / Lemari Kaca	1
69	Video Monitor	IT PLUS / PAKET VIDEOTRON OUTDOOR ITPlus P2.5 6x4	1
70	Video Monitor	Vewell / Paket Vewell LED Indoor P1.86	1
71	Film Projector	Epson / H972C / EB-X06 / Proyektor Multimedia	1
72	Lensa Kamera	Nikon / NIKKOR / DX SWM Aspherical	1
73	Micro Film	Sandisk / Micro SD Ekstreme Pro	1
74	Layar Film/Projector	Epson / EB-X51	1
75	Camera Digital	Insta360 X4 / 8K 360 Action Cam	1
76	Video Conference	Horion / Interactive Flat Panel IFPD 86K6A	1
77	Alat Studio Video Lainnya	GIK Vision / Videotrone	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
78	Alat Studio Pemetaan lainnya	DJI / RC / RM330	1
79	P.C Unit	Apple / iMac / A2873 /AIO 24 inci	2
80	P.C Unit	Acer / Aspire C24-1800	2
81	P.C Unit	DELL / W31C801	1
82	P.C Unit	Lenovo / ThinkCentre 50a 24 Gen 4	1
83	P.C Unit	DELL / OptiPlex 5400 AIO	5
84	P.C Unit	Lenovo / IdeaCentre AIO 3 24IAP7	1
85	P.C Unit	Lenovo / IdeaCentre AIO 3 22IAP7	1
86	P.C Unit	ASUS / AIO A3202WVAK-WPB585WS	2
87	Lap Top	ASUS / ROG G814J	1
88	Lap Top	ASUS / ROG G513R	2
89	Lap Top	Lenovo / YOGA 7 14AHP9	4
90	Lap Top	ASUS / ZenBook S 14	1
91	Note Book	Apple / MacBook Air M2 15 inch / A2941	1
92	Note Book	Apple / MacBook Pro 13 inch / A2338	1
93	Note Book	Lenovo / YOGA 7 14IRL8	2
94	Note Book	Lenovo / Yoga 7 2-in-1 14AHP9	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
95	Note Book	Macbook Aplle / Aplle M3 / A2918	1
96	Note Book	Lenovo / Yoga Slim 7 14IMH9	3
97	Note Book	ASUS / Vivobook S14 OLED / S5406MA_OLED713	1
98	Note Book	ASUS / Vivobook S14 OLED / S5406MA_OLED713	1
99	Note Book	Lenovo / Yoga Book 9i	1
100	Hard Disk	Sandisk / EXTREME PRO SDXC	1
101	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L 3210	3
102	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / EcoTank L5290	1
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3210	15
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Dot Matrix LX 310	1
105	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / DS-410	1
106	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson / WorkForces DS-410	1
107	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	brother / DS mobile DS-940DW	1
108	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Plustek / SMARTOFFICE PS3180U	8
109	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Ricoh / ScanSnap SV600	1
110	External/ Portable Hardisk	Sandisk / Extreme Portable SSD / SDSSDE61-1T00	4
111	Matras	RUBBER FLOOR / RUBBER FLOOR 2 CM	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
112	Peralatan Fitnes	BRTW / Low Row	1
113	Peralatan Fitnes	Tanpa Merk / ADJUSTABLE BENCH	1
114	Peralatan Fitnes	Tanpa merk / CABLE CROSS OVER MINI	1
115	Peralatan Fitnes	Tanpa Merk / Rooper (tali)	1
116	Peralatan Fitnes	DHZ / NEW SMITCH MACHINE	1
117	Peralatan Fitnes	Tanpa Merk / OLYMPIC CURCLE BAR	1
118	Peralatan Fitnes	BRTW / SHOLGER PRESS	1
119	Peralatan Fitnes	Tanpa Merk / GRIB TRISEP V	1
120	Peralatan Fitnes	BRTW / ROWING	1
121	Peralatan Fitnes	Tanpa merk / PULL DOWN BAR	1
122	Peralatan Fitnes	Precor / RUBBER PLATE	1
123	Treadmill	DHZ / TREADMILL KOMERSIL	1
124	Damble Set	Precor / Burble	1
125	Damble Set	Apex / DUMBLE SET UK 15 KG	1
126	Barble Set	tanpa merk / burble bijian	1
127	Rak Damble Set	Tanpa Merk / Rak Besi 2 Tingkat	1
128	Sepeda Olah Raga	Fitness / SEPEDA STATIS	1



No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
129	Kursi Putar	Acero / Comfort Office Chair BGY-1 Hitam	3
130	Kursi Putar	HomeDoki / hidrolix bisa naik turun	1
131	Kursi Biasa	Informa / sandaran tanpa putar	1
132	Kipas Angin	Maspion / MWF-41K / tempel dinding	1
133	Kompor Gas (Alat Dapur)	Rinnai / RI-522AT	1
134	Karpet	Momento / Ambal	1
135	Gordyin/Kray	Onna / GOLD ROLLER BLINDS	2

Sumber: Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kep[egawaian BPKAD, 2025



1.4 Keuangan

Pada Tahun 2025. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendapat alokasi Anggaran **Belanja Langsung** sebesar **Rp 1.263.982.752.617,- (Satu Triliyun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)** dan realisasi pada tahun 2025 **sebesar Rp. 1.188.531.206.515,- (Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)**

Tabel Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Belanja Operasi.	53.987.003.908,-	40.034.270.565,-	
2	Belanja Modal	11.840.909.906,-	10.829.465.570,-	
3	Belanja Tidak Terduga	8.860.000.000,-	0,-	
4	Belanja Transfer	1.189.294.838.803,-	995.941.431.099,-	
Jumlah		1.263.982.752.617,-	1.188.531.206.515,-	

1.5 Permasalahan utama dan isu strategis

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih terdapat alokasi belanja daerah yang belum sesuai dengan program dan kegiatan prioritas.
2. Penggunaan Anggaran masih ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Masih kurangnya kemampuan SDM pada OPD dalam bidang Akuntansi.
4. Masih terdapat pengurus barang pada OPD yang kurang memahami peraturan pengelolaan barang milik daerah.
5. Masih kurangnya perhatian pengurus barang daerah terhadap panatausahaan barang milik daerah.

ISU – ISU STRATEGIS

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
2. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan BMD
3. Peningkatan kualitas penatausahaan Keuangan Daerah.
4. Peningkatan kualitas Penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Peningkatan Kompetensi SDM.
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana.



1.6 Strategi dan kebijakan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan tata kerja serta mewujudkan tujuan OPD maka ditetapkan visi misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Adapun Visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera ”

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah :

VISI :

“ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN ”

Sejalan dengan visi di atas, maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.

TUJUAN :

Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

MISI RPJMD	TUJUAN MISI RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.	1. Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah



SASARAN :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja BPKAD.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
	2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan. 2. Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah
	3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan

Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

7NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	-	60.50	60.50	60.90	75.00
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	-	-	-	29	29	29	29



7NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Keuangan							
			Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	29	29	29
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	100%	100%	100%

STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi, disamping strategi hal terpenting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan.⁷

Dari gambaran diatas maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 2) Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal
- 3) Peningkatan kinerja pelayanan
- 4) Penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyusunan LKPD yang partisipatif dan akuntabel
- 6) Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
- 7) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- 8) Pemenuhan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kutai Kartanegara. Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:



- 1) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya
- 3) Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan
- 4) Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel
- 5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah
- 6) Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui berbagai kegiatan, dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan.

berikut ini disajikan rumusan sasaran IKU untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Visi Daerah : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia.
- MISI Daerah : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
- Visi Perangkat Daerah : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan
- Misi Perangkat Daerah : 1 Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3 Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	-	60.50	60.50	60.90	75.00
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	0	0	0	0	29	29	29
			Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	29	29	29
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan	-	-	-	-	100%	100%	100%



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Perundang Undangan	-						

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusunlah suatu Perjanjian Kinerja 2025 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencaai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi OPD. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional sepenuhnya dapat dirujuk pada perjanjian kinerja tahun 2025.

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD	Predikat	BB
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Skor	75.00
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	29
		Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	29
4	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Prosentase	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	964.680.000,00	APBD
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00	APBD



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	61.560.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.780.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.560.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.780.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	APBD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.000.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	50.000.000,00	APBD
8.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.556.662.347,00	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.242.810.347,00	APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.860.000,00	APBD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.930.000,00	APBD
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,00	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.062.000,00	APBD
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	72.000.000,00	APBD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	900.000.000,00	APBD
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.000.000,00	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	265.000.000,00	APBD
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	APBD



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	APBD
4.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	APBD
5.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD
6.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000.000,00	APBD
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.900.898.000,00	APBD
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.000.000,00	APBD
2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.000.000,00	APBD
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.000.000,00	APBD
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.184.580.000,00	APBD
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.580.000,00	APBD
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.600.000.000,00	APBD
5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300.000.000,00	APBD
6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	400.000.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.971.077.666,00	APBD
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.971.077.666,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000.000,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.350.000.000,00	APBD
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	500.000.000,00	APBD



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	APBD
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	APBD
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.350.000.000,00	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	5.950.000.000,00	APBD
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	200.000.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	250.000.000,00	APBD
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	250.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.400.000.000,00	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.400.000.000,00	APBD
7.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	300.000.000,00	APBD
8.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	200.000.000,00	APBD
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.000.000.000,00	APBD
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	250.000.000,00	APBD
11.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	APBD
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	1.852.602.455,00	APBD
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	79.545.455,00	APBD



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	213.075.000,00	APBD
4.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000,00	APBD
5.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49.982.000,00	APBD
6.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.496.021.326,00	
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	600.000.000,00	APBD
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	150.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.000.000,00	APBD
4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	900.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	199.999.800,00	APBD
6.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	436.021.526,00	APBD
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.239.294.838.803,00	
1.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000,00	APBD



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	(APBD / APBN)
2.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.189.294.838.803,00	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		APBD
	<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	21.647.327.956,00	APBD
1.	Penyusunan Standar Harga	600.000.000,00	APBD
2.	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	APBD
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	APBD
4.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	APBD
5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	250.000.000,00	APBD
6.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000,00	APBD
7.	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.500.000.000,00	APBD
8.	Penilaian Barang Milik Daerah	500.000.000,00	APBD
9.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15.147.327.956,00	APBD
10.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
11.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	APBD
12.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja BPKAD merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja BPKAD Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Target dan Capaian Kinerja BPKAD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target kinerja sasaran dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Hal ini disajikan di Tabel 3.1.1 yang memuat capaian kinerja BPKAD lima tahun terakhir.

Tabel. 3.1.1
Pencapaian Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOND ISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	B	BB
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	-	-	-	60.5	75.00	-	-	-	79,458	85,2277



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	.	.	.	.	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	.	.	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen
			Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	.	.	.	.	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	.	.	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	75%	80%	.	.	100%	100%	100%	.	.	100%	100%	100%

Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan telah menetapkan Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan telah dapat diukur tingkat pencapaiannya, pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dilihat dari tabel diatas Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Predikat Akuntabilitas BPKAD

Pada tahun 2025, Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai sebesar **74.34 Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Empat)** atau dengan predikat penilaian **“BB” (Sangat Baik)**, sebagaimana Tabel Berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2024	Nilai 2025	Peningkatan /Penurunan capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	23,69	22,05	Menurun
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40	20,80	Naik
3	Pelaporan Kinerja	15	7,95	11,49	Naik
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,88	20,00	Naik
		100	62,92	74,34	Naik



2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2025, hasil dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh skor **85.2277** capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar **75,00**

Sedangkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah), **terpenuhi 29 Dokumen.**

3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.

Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan pada seluruh OPD **telah sesuai 100%**, seluruh OPD dapat menyajikan laporan Neraca Barang Milik Daerah yang berkesesuaian dengan Laporan Neraca Keuangan.

3.1.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja serta capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel xxxxxxxx

Capaian Indikator Program Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No	Program / Kegiatan/ Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	%
5.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	B	Predikat	BB	Predikat	
5.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100
5.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daeerah.						
1	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	Persen	100	Persen	100
5.02.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah						
1	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100
5.02.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.						



No	Program / Kegiatan/ Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	%
1	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100
5.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	100	%	100
5.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	%	100	%	100
5.02.01.2.08. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	100	%	100
5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.						
1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu	100	%	100	%	100
2	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik	100	%	100	%	100
3	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	100	%	100	%	100
4	Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	100	%	100	%	100
5	Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu	100	%	100	%	100
6	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi	100	%	100	%	100
7	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%	100	%	100
8	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	%	100	%	100
9	Persentase Transaksi Non Tunai	100	%	100	%	100
10	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%	100	%	100
11	Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%	100	%	100
12	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	%	100	%	100
5.02.02.2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
1	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100	%	100	%	100
5.02.02.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100
5.02.02.2.03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100



No	Program / Kegiatan/ Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	%
5.02.02.2.04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	%	100	%	100
5.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.						
1	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	100	%	100
2	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%	100	%	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%	100	%	100
4	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%	100	%	100
5.02.03.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah.						
1	Jumlah BMD yang dikelola	100	%	100	%	100

Dari table diatas dapat dilihat pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD dengan capaian skor 74,34 (Predikat BB) pada tahun 2025, sedangkan Program lain tercapai 100%. ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tidak tersedianya jadwal DJKN/KPKNL untuk melakukan penilaian.
- Belum ada TIM penilai dari Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat melegalkan hasil penilaian.
- Aset tanah yang akan disertifikatkan, terkendala proses di BPN, karena persyaratan masih belum lengkap.

Target dan Capain Perjanjian Kinerja Kepala OPD

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	29	29
		Keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	29	29
2	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	100
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3
12	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	77
13	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	65



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100
15	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1	0

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan merupakan faktor penting bagi OPD. Dalam penyelenggaraan operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, memperoleh alokasi dana sebesar **Rp 1.263.982.752.617,- (Satu Triliyun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)** dan realisasi pada tahun 2025 sebesar **Rp. 1.188.531.206.515,- (Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)**, dengan prosentase Realisasi sebesar **94,03%** dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Belanja Operasi.	53.987.003.908,-	40.034.270.565,-	
2	Belanja Modal	11.840.909.906,-	10.829.465.570,-	
3	Belanja Tidak Terduga	8.860.000.000,-	0,-	
4	Belanja Transfer	1.189.294.838.803,-	995.941.431.099,-	
Jumlah		1.263.982.752.617,-	1.188.531.206.515,-	



3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Masih rendahnya daya serap anggaran di triwulan I dan triwulan II.
2. Realisasi anggaran terbesar berada di triwulan IV, terutama pada Bulan Desember.
3. Proses penyusunan anggaran kas yang masih tidak memperhatikan kebutuhan atas pelaksanaan kegiatan.
4. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan, karena kesalahan penganggaran.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan legislatif melakukan koordinasi Kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana Perimbangan yang merupakan hak Pemerintah Daerah.
- b. Kepala Daerah mendorong Badan Pendapatan Daerah, untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah, sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, yang bisa mengurangi ketergantungan pada transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini semoga dapat mendorong pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa mendatang lebih baik dan terus ditingkatkan sehingga sesuai dengan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada akhirnya akan terwujud aparatur pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Tenggarong, 14 Pebruari 2025

Kepala Badan,

Sukotjo, SE

Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197309081993021001